



TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Sulkhan Arief Widodo¹, Hendy Setiawan²

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri Batang

²Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri Batang

¹sulkhanarief20@gmail.com, ²hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tantangan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Batang. Tantangan pengelolaan sampah menjadi isu serius karena peningkatan volume sampah tahunan tidak diimbangi tata pengelolaan yang baik. Keadaan ini diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur dan rendahnya budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batang dalam menangani pengelolaan sampah saat terjadi *overload* TPA Randukuning. Penelitian menggunakan kajian pustaka dengan data sekunder dari berbagai media, jurnal, dan sumber lainnya yang dianalisis menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang belum mendapat solusi ideal karena berbagai keterbatasan dan kekurangan sarana pendukung, sehingga permasalahan sampah belum diselesaikan dengan solusi jangka panjang. Strategi Pemerintah Kabupaten Batang masih belum terfokus pada pendidikan dan pembentukan pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Kompleksitas tantangan tersebut memerlukan alternatif penanganan sampah yang lebih komprehensif di Kabupaten Batang.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Tantangan, Berkelanjutan, Kabupaten Batang

ABSTRACT

This paper discusses the challenges of sustainable waste management in Batang Regency. Waste management challenges have become a critical issue as the annual increase in waste volume is not supported by proper management systems. This situation is reinforced by limited infrastructure and low community culture in waste management. The research aims to analyze the challenges faced by the Batang Regency Government in handling waste management during the overload of Randukuning Disposal Site. The researcher employed literature review using secondary data from various media, journals, and other sources analyzed through Miles and Huberman qualitative methods. The research result shows that there were no ideal solutions on waste management challenges in Batang due to various limitations and inadequate supporting facilities, leaving waste problems unresolved with long-term solutions. The Batang Regency Government's strategy has not focused on education and behavioral pattern formation for independent household waste management. The complexity of these challenges requires more comprehensive alternative waste management approaches in Batang Regency.

Keywords: Waste Management, Challenges, Sustainability, Batang Regency



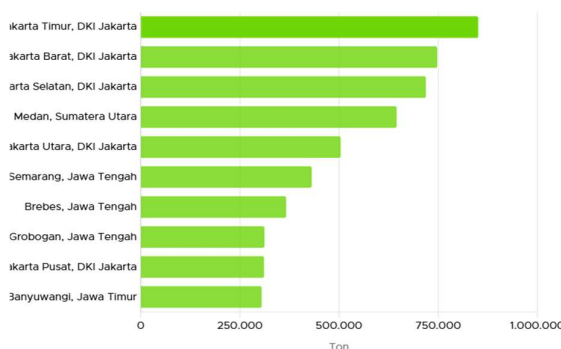
Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Tujuan tulisan ini akan membahas tentang tantangan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Besarnya jumlah produksi sampah di Indonesia diakui secara terang bahwa produksi sampah rumah tangga menjadi kontributor terbesar di Indonesia [1]. Hal ini tentu secara langsung ataupun tidak maka persoalan sampah terdistribusi baik dalam setiap wilayah dengan karakternya masing-masing. Ada daerah yang memiliki pengelolaan sampah yang cukup baik dan ada pula yang pengelolaan sampahnya sangat buruk. Artinya setiap wilayah memiliki peran strategis untuk menyelesaikan masalah sampah rumah tangga sehingga tidak menimbulkan problem besar [2].

Berdasarkan data tahun 2023 terkait dengan sistem informasi pengelolaan sampah nasional, setidaknya ada 10 kota di Indonesia dengan penghasil timbulan sampah tahunan terbanyak 2023. Kota pertama kedua, dan ketiga diduduki oleh Kota Jakarta, yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara untuk pada peringkat sembilan dan sepuluh diduduki oleh Kota Jakarta Pusat dan Banyuwangi. Gambar 1 berikut merupakan 10 kota penghasil timbulan sampah tahun 2023.



Gambar 1. 10 Kota Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak 2023

Berdasarkan data di atas, maka kedudukan Indonesia dalam kancah global sebagai negara dengan penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia dipicu oleh setiap daerah yang memiliki penghasil sampah besar. Hal itu tidaklah mengherankan karena besarnya sampah yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia berkontribusi signifikan dalam posisi global [3]. Ironisnya hal tersebut akan menjadi problem serius tidak hanya kancah global dan Indonesia saja, namun juga setiap daerah akan mengalami permasalahan sampah yang sama.

Sampah tidak akan menjadi masalah kalau penanganannya sudah optimal [4]. Namun demikian, untuk menuju penanganan sampah yang optimal tentu juga tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan banyak faktor, misalnya faktor konsumtif masyarakat juga dianggap sebagai bagian dari mengapa sampah produktifitasnya tinggi dan tidak terkendali [5]. Oleh karena itu maka setiap daerah harus dituntut memiliki strategi agar terhindar dari persoalan sampah sehingga kehidupan masyarakat lebih sehat dan sejahtera.

Penanganan dan pengelolaan sampah sebetulnya sudah dipraktikkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apalagi dengan kemampuan fiskalnya maka baik melalui APBN dan APBD pemerintah telah mengalokasikan danannya [6]. Apalagi kucuran dana dari sumber tersebut tidaklah sedikit dan setiap tahun anggaran biasanya ada alokasinya. Namun demikian, hasilnya belum cukup optimal dan signifikan. Bahkan jika diabaikan begitu saja, terkhusus sampah plastik, misalnya akan secara serius merusak dan sebagai polutan lingkungan. tidak cukup sampai di situ, sampah akan menciptakan ancaman kesehatan dan menimbulkan penyakit bagi manusia itu sendiri [7]. Realitas ini tentu seharusnya menjadi perhatian serius setiap pemerintah di daerah untuk melakukan

penanganan tata kelola sampah yang komprehensif sehingga tidak menjadi bumerang di masa depan. Setiap pemerintah di daerah diharapkan mampu melahirkan gerakan-gerakan inovatif sehingga pengelolaan sampah seharusnya selesai di tataran rumah tangga. Inilah yang menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk bisa menciptakan tata kelola sampah yang terpadu dan terukur [8].

Salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang masih mengalami hambatan terhadap penanganan sampah ialah pemerintah Kabupaten Batang. Meskipun Kabupaten Batang tidak termasuk dalam 10 besar penghasil sampah terbanyak nasional, namun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, masalah pengelolaan sampah masih menjadi tantangan, mengingat tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah (Semarang, Brebes, dan Grobogan) masuk dalam 10 besar penghasil sampah terbanyak nasional dengan total timbunan mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Secara administratif, Kabupaten Batang [9] menjadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terletak di bersebelahan dengan Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Status administratif Batang sebagai kabupaten nyatanya tidak lepas dari masalah sampah. Padahal biasanya sampah akan menjadi masalah serius di wilayah-wilayah urban, misalnya kalau di Jawa Tengah ialah Semarang karena Ibu Kota provinsi, dan Kota Surakarta sebagai salah satu kota di Jawa Tengah [10]. Namun demikian, masalah sampah tidak terbatas pada wilayah-wilayah urban saja, namun kini telah menyebar merata di setiap wilayah termasuk Kabupaten Batang. Hal ini juga dipicu oleh pola perilaku warga masyarakat yang masih minim kepedulian terhadap pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Batang sendiri menyadari bahwa pengelolaan sampah yang tertata, teratur, dan terpadu masih menjadi

tantangan berat. Apalagi ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah pula. Keberadaan sampah di Kabupaten Batang yang tidak terkelola mempengaruhi kebersihan dan estetika citra kota itu sendiri [11]. Apalagi di tahun 2024, beberapa tempat penampungan sampah menjadi sorotan serius dari publik. Tempat itu seperti TPS di Kadilangu, Gang Botol Kauman, dan Pasekaran dekat jembatan tol di mana sampah membludak dan belum terkelola dengan baik [12]. Jika dibiarkan saja tentu selain membuat citra Kabupaten Batang buruk juga akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah Batang abai dan tidak mengurus sampah sebagai masalah serius yang harus diselesaikan. Oleh karena itu usaha atas masalah itu menjadi penting yang akan menjadi nilai bagi publik.

Permasalahan sampah di Kabupaten Batang menjadi miris tatkala di mana produktifitas sampah yang tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Apalagi berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang menyebut bahwa timbunan sampah sudah mencapai 100 ribu meter kubik perharinya atau sekitar 250 ton [13]. Angka itu diprediksi akan meningkat di mana pola konsumtif masyarakat dan kesadaran akan sampah yang minim. Kalkulasi itu belum lagi di hari-hari keagamaan, di mana seharinya sampah mengalami lonjakan signifikan perharinya. Peningkatan jumlah produksi sampah yang tidak seimbang dengan pengelolaan inilah maka akan mengakibatkan tempat-tempat pembuangan sampah mengalami overload yang tidak terkendali dan pada akhirnya sampah menjadi terbengkalai dan tidak terurus.

Studi tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Batang, sebelumnya pernah dilakukan. Studi tahun 2021 dilakukan oleh Danna dan Kismartini yang melakukan kajian tentang analisis

kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan lima indikator, yakni *assurance*, *empaty*, *tangibles*, *reability* dan *responsiveness*. Hasil menunjukkan bahwa hanya indikator *assurance* dan *empaty* yang dinilai cukup baik dalam dimensi kualitas layanan. Sisanya menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Batang harus memberikan perhatian serius terhadap tiga dimensi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu maka secara keseluruhan analisis pelayanan persampahan di Kabupaten masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang persampahan [14].

Studi lainnya di luar fokus Kabupaten terkait dengan pengelolaan sampah juga sudah banyak dilakukan. Misalnya studi yang dilakukan oleh Hadi dan Afiyah pada tahun 2023 terkait dengan peran sosial masyarakat dalam membangun sikap kepedulian sampah menuju lingkungan yang sehat. Studi ini menekankan bahwa minimnya infrastruktur persampahan menjadi kendala dalam penanganan sampah. Hal itu juga diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang efektif [15]. Oleh karena itu dua hal tersebut masih menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penanganan sampah.

Berangkat dari uraian persoalan tersebut tentu penelitian ini akan memperluas lebih jauh dari temuan studi yang dilakukan oleh Danna dan Kismartini tahun 2021 di kabupaten Batang. Penelitian ini akan berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Batang dalam menciptakan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rumusan utama masalah penelitian ini ialah bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menciptakan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tulisan ini akan berkontribusi pada uraian

tantangan apa saja yang sampai saat ini membuat Pemerintah Kabupaten Batang masih kewalahan menangani persoalan sampah. Terlebih belum ada studi terdahulu yang menguraikan tentang tantangan penanganan sampah di Kabupaten Batang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan literature akurat dan relevan [16]. Penggunaan desain penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dari literature sumber sekunder sehingga dengan kaya data rumusan masalah mampu dijawab secara presisi [17].

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah [18]. Peneliti melakukan penelitian dengan model kepustakaan di Kabupaten Batang, khususnya isu berkaitan dengan tantangan pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan data-data sekunder relevan kepustakaan seperti laporan, arsip, media, berita, buku, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang relevan [19]. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif Miles dan dan Huberrmen. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis kualitatif meliputi

koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan terbagi ke dalam lima sub bahasan, yakni bahasan pertama berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Bagian ini akan menyoroti kapasitas pemerintah dalam melakukan pengembangan pengelolaan sampah. Kedua, akan membahas mengenai masalah ketersediaan sumber daya manusia. keberadaan sumber daya manusia akan diuraikan dalam bagian ini. Ketiga yakni membahas berkaitan dengan tantangan pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah. Bagian ini akan menyoroti keterdudukan infrastruktur persampahan yang ada di Kabupaten Batang. Keempat yakni sub bahasan mengenai tantangan pengembangan teknologi persampahan. sub ini akan mengurai bagaimana upaya pemerintah dalam mengupayakan tersediannya teknologi pengelolaan sampah yang mampu menyelesaikan masalah sampah di sana. Terakhir yakni membahas mengenai pola sadar pengelolaan sampah rumah tangga dari masyarakat itu sendiri. bagian ini menyoroti tentang pola kesadaran masyarakat Kabupaten Batang di tengah persoalan isu sampah yang semakin besar dan tidak terkendali produktifitasnya.

3.1. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Isu sampah di Kabupaten Batang sampai hari ini terus menjad momok yang menakutkan bahkan menmbulkan satu kecemasan publik. Lambatnya peran pemerintah setempat dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Batang telah menciptakan satu kondisi di masyarakat akan bagaimana pemerintah hadir dalam menyelesaikan isu sampah. Secara terang-terangan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup

setempat menyebut bahwa isu persampahan di wilayahnya masih menjadi tantangan berat yang sedang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang [12]. Hal ini mengingat tingginya produksi sampah tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Alhasil kini sampah masih menjadi masalah kritis dan krisis yang belum tertangani dengan baik.

Namun di saat yang sama, persepsi buruk itu menciptakan satu tantangan besar di mana sampah harus menjadi perhatian utama dari pemerintah setempat agar terbangun sistem pegelolaan sampah yang komprehensif dan terkelola. Di samping itu, dalam kerangka penanganan isu sampah yang masih cukup berat, dengan pertimbangan masalaah utama di mana kesadaran masyarakat Batang rendah, maka tentu menuntut Pemerintah Kabupaten Batang mencari solusi. Pemerintah Batang harus terus berupaya memberikan solusi penangana terbaik atas masalah sampah yang ada. Kondisi kesadaran lingkungan dari masyarakat yang rendah sekaligus didukung oleh keterbataasan penampungan sampah. Oleh karena itu di tahun 2022 silam Pemerintah Batang meluncurkan satu diskusi publik tentang penanganan sampah berbasis pada satu konsep pemberdayaan masyarakat.

Masalah sampah yang ada di Batang tidak mudah diselesaikan. Hal ini mengingat bahwa sampah masih menjadi masalah kompleks sehingga perlu penanganan yang lebih serius dengan diimbangi dengan inovasi dan kreativitas untuk melibatkan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan pemerintah yang terbatas tersebut menuntut masyarakat untuk ikut serta dan bahu membahu mengatasi hal tersebut. Apalagi dalaam kondisi hari raya di mana tentu akan terjadi peningkatan volume sampah. Biasanya dalam merespon penumpukan volume sampah yang melonjak, Pemerintah Kabupaten Batang menyiagakan

100 tenaga kebersihan untuk menangani sampah selama lebaran.

“Para petugas kebersihan dan 13 truk mengambil sampah dari tempat pembuangan sementara untuk selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning. Selanjutnya, sisa sampah yang lebih didominasi sampah rumah tangga itu akan terus meningkat karena aktivitas warga yang juga meningkat. Apabila hal itu, tidak ditangani dengan cepat maka bisa menyebabkan penumpukan di tempat pembuangan sampah sementara” (disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada Senin, 25 April 2023).

Merujuk pada ungkapan di atas maka dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah memberikan tambahan tenaga dukungan dalam pengelolaan sampah khusus di hari lebaran. Artinya dengan ketersediaan itu setidaknya untuk mengimbangi jumlah ketenagaan pengelolaan sampah seiring dengan peningkatan volume sampah yang bersumber dari rumah tangga yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diikuti bahwa Pemerintah Kabupaten Batang untuk menangani sampah dilakukan dengan beberapa hal. Pertama melalui DLHnya, Pemerintah Kabupaten Batang berusaha dengan kewenangan yang dimilikinya untuk membangun tata kelola sampah yang didasarkan pada satu kesadaran masyarakat. Kedua, DLH memberikan dukungan tambahan sebagai alasan rasional atas peningkatan volume sampah dalam waktu tertentu. Namun demikian, sampai hari ini belum ada dampak positif baik atas terbangunnya satu kesadaran masyarakat maupun dari sisi ketercukupan SDM pengelolaan sampah yang ada. Oleh karena itu, maka pemerintah harus dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan

secara efektif dan efisien sehingga masalah ini mampu terselesaikan dengan baik.

3.2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dinilai akan berhasil dalam pelaksanaannya apabila ada partisipasi aktif dan inovatif dari warga masyarakat. Partisipasi yang bermakna ini dalam penanganan sampah menjadi komponen kunci untuk memastikan bahwa sampah merupakan tanggungjawab bersama sehingga perlu dilakukan sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri. harus diakui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu sumber daya sekaligus modalitas sosial yang disadari atau tidak mampu mempercepat penanganan sampah yang ada. Sementara itu dalam konsep partisipasi masyarakat atas penanganan sampah di Batang, maka di Batang ada komunitas masyarakat Batang yakni Batang Bumi Lestari (BBL) di mana komunitas tersebut gencar ubah sampah menjadi rupiah. Aktivitas gerakan itu mencoba untuk menyebarluaskan pengelolaan sampah yang lahir dari rahim masyarakat itu sendiri, sehingga secara bersama-sama akan meningkatkan pembentukan lingkungan yang sehat, aman dan bersih di Kabupaten Batang.

Gerakan peduli sampah yang diinisiasi oleh BBL tersebut di satu sisi sebagai respon positif untuk menyikapi keadaan di mana terjadi overloaddnya TPA Randukuning Batang. Apalagi ketua BBL menyebut bahwa jumlah sampah yang terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan lonjakan populasi masyarakat. akibatnya ini tentu ketika tidak dikontrol dengan hati-hati akan berakibat pada sector keberlanjutan lingkungan. Ketua BBL menyampaikan bahwa:

“Kegiatan Webinar tentang Ubah Sampah Menjadi Rupiah ini semata-

mata kepedulian Batang Bumi Lestari terhadap kondisi di Kabupaten Batang terutama sampah yang begitu besar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randukuning” (disampaikan oleh Agus Winoto, Ketua BBL batang pada 26 Agustus 2021.

Berdasarkan uraian pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa muncul usaha yang tumbuh dari masyarakat merespon situasi darurat penanganan sampah di Batang. Namun demikian, keberadaan BBL itu patut diapresiasi karena sudah ada kesadaran yang muncul. Namun, hanya saja ke depannya tentu keberadaan BBL ini harus lebih nampak lagi dengan gerakan-gerakan inovatif yang mampu memikat setiap masyarakat sehingga terbangun kesadaran kolektif di masyarakat yang berujung pada kesadaran penanganan sampah setempat.

Selain BBL, keberadaan komunitas penanganan sampah di Batang juga ada yang namanya KSM Resik Agawe Tenang yang ada di Desa Semampir Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Keberadaan komunitas ini sangat membantu penanganan sampah Kabupaten Batang, karena setiap harinya saja komunitas KSM ini mampu mengelola sampah sebesar 20 ton perhari. Jumlah ini tentu sangat fantastis karena bila setiap desa memiliki komunitas seperti ini saja tentu masalah sampah akan selesai di desa saja. pengelolaan sampah yang dilakukan KSM ini dikelola dengan system Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R). Gambar 2 berikut merupakan peninjauan pengelolaan sampah di KSM oleh PJ Bupati Batang.



Gambar 2. Peninjauan Penanganan Sampah dari KAM Agawe Resik oleh PJ Bupati Batang

Berdasarkan gambar 2 di atas maka dapat dilihat bahwa keberadaan KSM yang ada di Desa Semampir Kecamatan Reban mendapat perhatian dari Pj Bupati Batang yakni Ibu Lani Dwi Rejeki. Namun demikian jika dilihat secara seksama tentu keberadaan KSM ini harusnya mampu menjadi kebijakan alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang misalnya satu desa satu KSM Agawe Resik pengelolaan sampah. Apabila ini berhasil dilakukan secara menyeluruh tentu kedepannya Batang akan terbebas dari masalah sampah yang sampai saat ini masih menjadi tantangan berat.

3.3. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Ketersediaan infrastruktur penunjang dalam pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam kerangka tujuan memastikan sampah bisa dikelola dengan sarana yang memadai. Adanya infrastruktur yang merata baik di setiap desa, di setiap kecamatan tentu akan memudahkan setiap petugas persampahan dalam merespon setiap lonjakan sampah yang ada. Namun demikian, pengadaan infrastruktur di setiap daerah, termasuk khususnya di Kabupaten Batang masih belum menjadi prioritas kebijakan utama. Akibatnya tidak heran apabila setiap desa bahkan kecamatan ketersediaan infrastruktur persampahannya belum merata dan terbatas.

Jika hal demikian yang terjadi, maka tentu yang menjadi persoalan ialah bagaimana mungkin sampah bisa diselesaikan di desa, di kecamatan kalau sarana dan prasarana saja tidak disediakan. Hal inilah yang kemudian menjadi satu keprihatian yang segera mungkin harus direspon pemerintah setempat. Begittupun juga yang terjadi di Batang, di mana sebaran dan distribusi sampah tidak dan belum merata. Gambar 3 berikut merupakan data sarpras persampahan di Batang Tahun 2023 [20].

Kecamatan Subdistrict	Truk Sampah Garbage Truck	Truk Kontainer Container Truck	Kontainer Container	Gendak Sampah Garbage Cart	Tempat Pembuangan Sementara Transfer Garbage Place	Tempat Pembuangan Akhir End Garbage Place	Truk Njaja Esistence Truck	Transfer Depot	Instalasi Pengolah Instalation Processing	Mobil Kecil (Mik Car	Boda 3 Wheel	Truk Umum Umum Truck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
010 Wonotunggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 Bandar	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	3	-
030 Blado	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
040 Naban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
050 Bawang	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
060 Terseno	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
070 Grogong	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-
080 Limbung	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
091 Banyuwatuh	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
095 Subah	-	-	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-
099 Pecalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Tulis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
101 Kademban	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
110 Batang	9	4	11	115	49	-	2	1	-	4	9	-
120 Warungasem	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2023	15	4	12	121	81	1	2	1	0	4	21	0

Gambar 3. Data Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Batang

Berdasarkan data di atas dari dari 15 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Batang keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanganan sampah masih cukup memprihatinkan. Bahkan dilihat dari data BPS tahun 2023 di atas justru ada dua kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan. Kedua kecamatan itu adalah Kecamatan Wonotunggal dan Kecamatan Pecalongan. Sementara di tigabelas kecamatan lainnya jumlah ketersediaannya masih cukup minim dan memprihatinkan. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana di masing-masing kecamatan yang masih sangat jauh dari standar layak maka ini menjadikan pelayanan persampahan dari warga kurang maksimal. Akibatnya wajar saja kalau budaya kumpul dan buang menjadi budaya

masyarakat mengingat layanan sampah tidak didukung oleh ketersediaan infrastrukturnya.

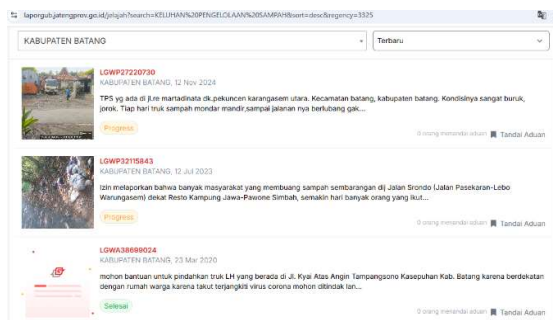
3.4. Tantangan Penciptaan Teknologi Pengelolaan Sampah

Berbicara mengenai teknologi dalam penanganan sampah tentu juga bagian dari proses penting dalam menuntaskan pengelolaan sampah yang muktakhir. Terkhusus di Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini Pemerintah Kabupaten Batang masih belum memiliki teknologi tepat guna dan efektif dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan selain masih adanya keterbatasan dari TPA yang ada, juga karakteristik masyarakat yang kumpul dan buang dalam memperlakukan sampah. Sampah yang dikelola dengan metoda kumpul dan uang inilah yang menyebabkan sampah tiba-tiba menumpuk terbengkalai dan masyarakat sendiri tidak mamu mempedulikannya. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan teknologi maka pemerintah setempat ke depannya perlu memikirkan terobosan teknologi yang mampu mengelola sampah dengan volume yang cukup besar agar tidak semakin terbengkalai.

Tidak tersedianya teknologi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Batang tentu membuat dan menciptakan berbagai keluhan penanganan sampah di Batang. Terlebih kemunculan kelompok komunitas masyarakat yang bergerak dalam isu sampah dan lingkungan hidup di Batang masih sangat minim dan terbatas. Ini tentu tidak berimbang dengan produktivitas sampah rumah tangga yang tinggi dengan akselerasi penanganan sampah yang ada. Alhasil masyarakat setempat tentu selalu mengeluhkan bahkan diantara mereka menggunakan kanal-kanal laporan aduan yang telah disediakan.

Misalnya mereka melaporkan kejadian itu di lapor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di

laman laporgub.jatengprov.go.id apabila masyarakat sudah sampai melaporkan ke tingkat provinsi, tentu artinya mereka sudah putus asa dan putus harap dengan penanganan sampah di Batang. Gambar 4 berikut merupakan kanal aduan masyarakat ke lapor Gubernur Jawa Tengah atas sampah yang tidak tertangani oleh Pemkab Batang. Gambar 4 tersebut merupakan aduan penanganan sampah dari masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah.



Gambar 4. *Aduan penanganan sampah dari masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah*

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dilihat bahwa adanya rasa kekecewaan dan keluhan masyarakat Batang atas masalah sampah yang tidak mendapat tanggapan dengan baik membuat mereka melakukan inisiatif yakni dengan menggunakan kanal aduan ke pemerintah di atasnya. Harapannya melalui laporan itu maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meminta laporan dan kinerja untuk segera menuntaskan setiap laporan yang masuk di kabupaten yang dilaporkan.

Ada satu hal keterhubungan bagaimana teknologi pengelolaan sampah dengan keluhan-keluhan yang ada. Peneliti menemukan bahwa tidak adanya teknologi penanganan sampah yang memadai di Kabupaten Batang tentu membuat pemerintah setempat sangat kewalahan menangani sampah. Terlebih sumber-sumber sampah sangat banyak mulai dari yang bersumber

rumah tangga, pasar, aktivitas perusahaan, dan lainnya. Akibatnya pemerintah setempat gagal merespon penanganan sampah akibat ketidakadaan teknologi yang membantunya. Pada akhirnya banyak layanan sampah yang terhenti dan budaya kumpul buang semakin menguta, dan berujung pada laporan masyarakat yang resah akibat sampah.

3.5. Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Keberadaan sampah yang ada di Kabupaten Batang tidak hanya menuntut Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikannya sendiri. Lebih dari sekadar itu, di samping peran pemerintah setempat terus bergerak dan mengambil kebijakan persampahan efektif juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang menjadi bagian dari gerakan seluruh komponen daerah untuk bahu membahu dan terus berjibaku bahwa sampah harus diatasi dengan berbagai kolaborasi dan membangun jejaring kemitraan. Sekalipun berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini dengan satu pertimbangan penting bahwa masyarakat rumah tangga menjadi contributor utama atas pasokan sampah yang ada di Kabupaten Batang. Artinya dari volume sampah yang ada, rumah tangga keberadaannya sebagai penyumbang sampah paling besar. Jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu tidak heran apabila eksistensi masyarakat setempat harus dilibatkan secara kolektif dalam menangani sampah di Batang.

Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Batang menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan penataan persampahan ke depannya. Terlebih berbagai peristiwa ironis, di mana sampah rumah tangga yang tidak terkelola dan tidak selesai di tempat menjai tumpukan terbengkalai baik

di desa-desa, jalan-jalan, bahkan terbuang dalam tempat yang tidak seharusnya. Misalnya saja kasus yang terjadi pada maret 2024 yang lalu, di Desa Surjo Kecamatan Bawang. Kasus itu menghebohkan di mana secara tiba-tiba jalan tertimbun sampah sebesar 2 ton dan itupun mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Batang. Kejadian itu tentu cukup disayangkan karena tempat jalan masyarakat secara serampangan dan tidak terukur ditimbuni oleh ton-ton-an sampah. Selain itu, realitas kasus itu juga secara langsung atau tidak mencerminkan budaya masyarakat yang masih cukup rendah dan pola pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup buruk. Terlebih kapasitas penampungan sampah di Kabupaten, yakni TPA Randukuning juga overload. Artinya ada dua tantangan berat yakni terbatasnya tempat pembuangan sampah yang tersedia diperburuk dengan budaya masyarakat yang juga buruk.

Adanya timbunan sampah sebagaimana yang terjadi di Desa surjo tentu telah mencerminkan budaya buruk dari masyarakat akan pengelolaan sampah rumah tangga. Padahal keberadaan masyarakat sendiri justru menjadi pemain penting dalam upaya penanganan sampah rumah tangga. Setiap desa seharusnya menjadi ujung tombak sebagai satu entitas yang memberikan kepastian bahwa sampah rumah tangga harus bisa selesai ditangani dalam lingkup desa. Tidak boleh sampah rumah tangga tidak selesai dalam desa karena bila sudah keluar dari desa justru akan terbengkalai dan menimbulkan timbunan ceceran sampah yang mengganggu kenyamanan warga. Ini artinya masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Faizin terhadap kasus di Desa Surjo yang menyampaikan bahwa:

“Sampah itu bukan masalah sepele, itu masalah serius. Kalau ada keinginan yang kuat terhadap itu ya, sampah harus jadi prioritas utama. Harapannya, sampah itu selesai di tingkat desa ” (disampaikan oleh Nur Faizin, pada 28 April 2024)

Apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang merupakan sebuah respon keprihatinan yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Batang. Hal ini mengingat bahwa selama ini konstruksi budaya masyarakat akan sampah belum sepenuhnya muncul satu rasa inisiatif yang melahirkan inovasi dan kreativitas akan sampah. Akibatnya banyak masyarakat yang abai dan tidak peduli akan sampah sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah harus berupaya keras untuk menangani hal tersebut.

4. Kesimpulan

Peran pemerintah setempat dalam penanganan sampah di Kabupaten Batang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan budaya masyarakat terhadap perlakuan sampah rumah tangga yakni kumpul buang, sehingga membuat pemerintah setempat kewalahan dalam menangani masalah sampah tersebut. Oleh karena itu peran aktif pemerintah baik dari sisi regulasi yang kuat mengikat dan penyiapan anggaran pengelolaan sampah perlu menjadi prioritas di masa yang akan datang. Sampah di Batang kebanyakan bersumber dari sampah rumah tangga yang tidak tertangani. Oleh karena itu maka yang menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan setiap sampah yang bersumber rumah tangga harus mampu diselesaikan di tingkat rumah tangga melalui implementasi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Contoh aplikatif yang dapat dilakukan meliputi: (1) *Reduce* - mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dan memilih produk dengan kemasan minimal, (2)

Reuse - memanfaatkan kembali wadah plastik untuk pot tanaman atau tempat penyimpanan, dan (3) *Recycle* - memilah sampah organik untuk kompos dan sampah anorganik untuk didaur ulang. Selain itu, setiap rumah tangga dapat menerapkan sistem bank sampah rumahan dan composting untuk sampah organik. Dalam aspek ini peran rumah tangga dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya dilakukan dan berjalan secara optimal.

Masih minimnya Pemerintah Kabupaten Batang dalam melibatkan berbagai pihak dalam penanganan sampah. Alhasil seolah-olah sampah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, sehingga berdampak pada tingkat hambatan besar yang dialami oleh pemerintah dalam menangani sampah di Batang. Oleh karena itu, yang terpenting ialah elemen partisipasi perlu digalakkan dan diaktifkan agar ada semangat gotong royong berbagai pihak dalam mengelola sampah. Sampah masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan tidak tersediannya teknologi muktakhir pengelolaan sampah. Padahal keberadaan teknologi pengolahan sampah menjadi penting dalam mempercepat penanganan sampah di Batang. Hal itu terbukti di mana tidak adanya teknologi membuat sampah di Batang sulit tertangani dan terus menjadi masalah ke depannya.

Hambatan pengeolaan sampah di Batang juga dihambat oleh ketersediaan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah. Bahkan sebaran dan ketersediaannya di setiap desa dan kecamatan sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan dan desa yang sama sekali tidak memiliki sarana dan prasaranan pendukung dalam mengelola sampah. Oleh karena itu hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan ke depan. Ketersediaan sumber daya di batang dalam penanganan sampah masih juga jadi problem. Ha ini terlihat dari sisi sumber daya baik anggaran, partisipasi,

dan kapasitas instansi terkait belum mampu merespon masalah ini dengan cepat. Akibatnya perlu dorongan kuat untuk peningkatan kapasitas sumber daya dalam kerangka menciptakan Batang sebagai kabupaten sehat yang tidak terkotori oleh masalah sampah. Pada aspek perencanaan tujuan pengelolaan sampah yang sedang berjalan tentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini penting dilakukan dalam tujuan utama yakni menghasilkan solusi jangka panjang dalam penanganan sampah. Untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan rekomendasi kebijakan berupa: (1) Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dengan sanksi tegas bagi pelanggar, (2) program insentif ekonomi seperti pengurangan retribusi sampah bagi rumah tangga yang menerapkan 3R, (3) kampanye edukasi masif melalui media lokal dan tokoh masyarakat, (4) pembentukan kader lingkungan di setiap RT/RW sebagai penggerak perubahan perilaku, dan (5) penerapan sistem reward and punishment melalui lomba desa/kelurahan bersih. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring harus secara teliti dan hati-hati terus dilakukan agar isu sampah yang *overload* dan kapasitas terbatas tidak terulang kembali.

5. Daftar Pustaka

- [1] U. Septiani, Najmi, and R. Oktavia, "Eco Enzyme : Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan," *J. Univ. Muhamadiyah Jakarta*, vol. 02, no. 1, pp. 1–7, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- [2] A. R. Dwicahyani, A. D. Radityaningrum, E. Novianarenti, and E. Ningsih, "Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat di Bank Sampah Wilayah Simojawar," *J.*

- Pengabd. Masy. dan Apl. Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–29, 2022, doi: 10.31284/j.adipati.2022.v1i1.2555.
- [3] S. Hermawan and W. Budyatmodjo, “Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia,” *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 181–206, 2022, doi: 10.22437/ujh.5.1.181-206.
- [4] J. Sukmareni, S. A. Sianipar, S. N. Fadiah, and M. Esterilita, “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budi Daya Maggot Sebagai Alternatif Penanggulangan Sampah Organik Masyarakat Di Desa Cijagang,” *J. Sci. Res. Dev.*, vol. 5, no. 2, pp. 341–355, 2023, doi: 10.56670/jsrd.v5i2.219.
- [5] M. H. Laia, “Analisis Penanggulangan Sampah Plastik Di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan,” *FAGURU J. Ilm. Mhs. Kegur.*, vol. 3, no. 1, pp. 181–197, 2024.
- [6] N. H. D. Ulhaq, “Analisis Faktor Penyebab dan Identifikasi Temuan Program dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Jepara,” *JISHUM J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 997–1014, 2023, doi: 10.57248/jishum.v1i4.238.
- [7] F. Widyawati, S. Bahtiar, R. Desiasni, L. Suhaimi, E. Yanuar, and I. P. Widiantera, “Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Sampah Plastik di SMKN 2 Sumbawa Besar,” *Bima Abdi J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 22–29, 2023, doi: 10.53299/bajpm.v3i1.262.
- [8] B. Sekarningrum, D. Yunita, and Y. Suprayogi, “Gerakan Pemberdayaan Keshjahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Kawasan Bebas Sampah,” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 11, pp. 946–949, 2018.
- [9] D. Ratna Sawitri, A. Budihardjo, S. Sumiyati, and M. Zulfa Alfauqy, “Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Batang: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi,” *RISTEK J. Riset, Inov. dan Teknol. Kabupaten Batang*, vol. 7, no. 1, pp. 61–71, 2022, doi: 10.55686/ristek.v7i1.129.
- [10] C. I. Sushmita, “Jawa Tengah Nyaris Tertimbun Sampah! Kota Ini Penyumbang Terbesarnya,” <https://regional.espos.id/>, 2022. <https://regional.espos.id/jawa-tengah-nyaris-tertimbun-sampah-kota-ini-penyumbang-terbesarnya-1314326>
- [11] L. Hanafi, “Sampah Penuhi Jalanan di Sekitar Pasar Plelen Gringsing, Kabupaten Batang,” *metropekalongan.jawapos.com*, 2024. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2265403781/sampah-penuhi-jalanan-di-sekitar-pasar-plelen-gringsing-kabupaten-batang>
- [12] S. Andriani, “Tantangan Berat Pemkab Batang Mengelola Sampah, Kadis LH: Kasadaran Masyarakat Masih Rendah,” *infopublik.id*, 2024. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/837180/tantangan-berat-pemkab-batang-mengelola-sampah-kadis-lh-kasadaran-masyarakat-masih-rendah>
- [13] Lingkarjateng, “Miris! TPA Batang Overload, Timbunan Sampah Capai 250 Ton per Hari,” <https://lingkarjateng.id/>, 2023. <https://lingkarjateng.id/news/miris-tpa-batang-overload-timbunan-sampah-capai-250-ton-per-hari/>
- [14] D. C. Danna and Kismartini, “Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang,” *Kolaborasi J. Adm. Publik*, vol. 7, 2021, doi: <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.5630>.
- [15] A. Hadi and S. Afiah, “Peran Sosial Masyarakat Peduli Sampah Dalam Menciptakan Lingkungan Bersih Dan Sehat Di Jatipandak, Sambeng Lamongan,” *HUMANIS J. Ilmu-Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 15, no. 1, pp. 67–73, 2023, doi: 10.52166/humanis.v15i1.3842.
- [16] H. Setiawan, “Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua,”

- SOSHUM J. Sos. dan Hum. [Journal Soc. Sci. Humanit.*, vol. 12, no. 1, pp. 13–23, 2022, doi: <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.13-23>.
- [17] H. Setiawan and C. Choirunnisa, “Intervensi Diversifikasi Pangan Lokal dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Batang: Analisis Kajian Politik Keamanan Non-tradisional,” *Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 3, no. 2, pp. 78–90, 2023, doi: [10.55480/saluscultura.v3i2.112](https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.112).
- [18] J. Raco, “Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya,” 2018, doi: [10.31219/osf.io/mfzuj](https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj).
- [19] H. Setiawan, G. W. Widiono, and G. Hikmah, “The Formation of the New Autonomous Region of Papua and Welfare Guarantees in the Decentralization Policy,” *J. Borneo Adm.*, vol. 19, no. 3, pp. 319–332, 2023, doi: [10.24258/jba.v19i3.1181](https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1181).
- [20] BPS, “Banyaknya Sarana Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang, 2023,” *bps.go.id*, 2024. <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NzA0IzE=/banyaknya-sarana-pengelolaan-sampah-dan-limbah-yang-dikelola-dinas-lingkungan-hidup-menurut-kecamatan-di-kabupaten-batang--2023.html>